

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN  
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar ada kepastian hukum bagi petugas pelaksana di lapangan dalam pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019, perlu diatur norma tindak lanjut sanksi administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran massa; dan/atau
  - d. penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 13 huruf d dikenakan sanksi berupa tindakan membawa orang tersebut ke lokasi isolasi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 30 ayat (6) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk selama 14 (empat belas) hari;

- d. penutupan tempat usaha, lembaga dan/atau instansi selama 14 (empat belas) hari; dan/atau
  - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pelanggar terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang mengakibatkan tindak pidana, dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 24 Juli 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 27